BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka Terkait Permasalahan

1. Kebijakan Publik

a. Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan publik diartikan sebagai rangkaian tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mencapai suatu target dan menyelesaikan suatu masalah yang dilakukan sesuai dengan yang waktu yang telah ditentukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada (Desrinelti, Afifah, dan Gistituati 2021)Kebijakan publik menjadi tolak ukur utama bagaimana penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan dibuatnya kebijakan publik adalah untuk merespon kebutuhan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan kebijakan publik telah ditentukan standar-standar yang dapat menjadi penilaian berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan. Kebijakan publik dianggap gagal ketika dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan prosedur, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan tujuan dan justru menimbulkan masalah baru yang memerlukan sumber daya tambahan untuk penanganannya(Kristian 2023)

b. Tahapan Perumusan Kebijakan Publik

Perumusan kebijakan publik ini melalui beberapa tahapan-tahapan yang cukup banyak dan tidak asal-asalan. Menurut Ripley (2005), tahapan-tahapan perumusan kebijakan publik adalah sebagai berikut (Muadi, MH, dan Sofwani 2016):

1) *Agenda Setting*

   Pada tahap ini dilakukan pengidentifikasian untuk menentukan yang mana akan menjadi prioritas pemerintah dalam perumusan kebijakan.

2) *Formulation dan Legitimation*

Tahap berikutnya adalah melakukan perancangan kebijakan yang kemudian hasil rancangan tersebut di sah kan.

3) *Program Implementations*

Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting karena pada tahap ini dapat menentukan berhasil atau tidak sebuah kebijakan publik.

4) *Evaluation of implementation, performance, and impacts*

Dalam tahap ini dapat dilihat seberapa besar efektivitas dan efisiensi sebuah kebijakan setelah diimplementasikan.

5) *Decisions about the future of the policy and program*

Tahapan terakhir ini pemerintah harus memastikan kebijakan akan dilanjutkan atau dihentikan.

2. Konsep Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Dalam membuat sebuah kebijakan implementasi merupakan tahapan yang paling penting. Implementasi kebijakan merupakan proses menjalankan pilihan yang telah disepakati dari berbagai alternatif yang telah dirancang(Elwijaya, Mairina, dan Gustituati 2021). Dalam implementasi kebijakan kita dapat melihat kekurangan dan kelebihan yang terdapat pada kebijakan tersebut. Maka dari itu diperlukan perencanaan yang matang dalam proses pengimplementasian kebijakan.

b. Model Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik memiliki peranan penting untuk mengubah keadaan. Implementasi kebijakan publik harus diidentifikasi secara cermat dengan mengetahui faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab gagal atau berhasilnya sebuah kebijakan publik. Berikut beberapa model implementasi kebijakan berdasarkan menurut para ahli (Sumatsa 2021):

1) Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Pada model Metter dan Horn implementasi kebijakan berjalan secara berurutan, yaitu keputusan politik, pelaksana dan hasil kebijakan. Berikut variable-variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik menurut Metter dan Horn:

a) Ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja dalam pengimplementasian kebijakan publik harus dapat diukur tingkat keberhasilannya.

b) Sumber daya

Sumber daya manusia merupakan sumber daya utama yang dapat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik dibanding sumber daya lainnya seperti finansial dan waktu.

c) Karakteristik agen pelaksana

Organisasi baik formal maupun informal harus sesuai dengan objek yang ingin diubah. Misalnya ingin mengubah perilaku manusia , maka karakteristik yang harus dimiliki oleh agen pelaksana adalah karakteristik yang tegas, jelas dan konsisten.

d) Sikap para pelaksana

Penerimaan atau penolakan kebijakan oleh pelaksana bisa saja terjadi karena rumusan kebijakan tersebut bukan hasil dari rumusan warga setempat yang paham mengenai masalah dan tantangan yang mereka hadapi.

e) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Komunikasi yang baik para pihak yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan dapat mengurangi resiko terjadinya kesalahan.

f) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Jika lingkungan ekonomi, sosial, dan politik tidak kondusif maka hal tersebut dapat meningkatkan resiko terjadinya kegagalan dalam implementasi kebijakan publik.

2) Model Mazmanian dan Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier, kemampuan dalam mengamati variabel yang menjadi pengaruh dalam mencapai tujuan formal dalam proses implementasi merupakan peran yang sangat penting dari implementasi kebijakan publik. Berikut 3 variabel yang berpengaruh besar dalam implementasi kebijakan:

a) Karakteristik Masalah

Mudah-tidaknya sebuah masalah yang akan ditangani, diantaranya kesulitan teknis, ragam perilaku yang akan dihadapi, totalitas penduduk yang menjadi kelompok sasaran, dan seberapa besar dan luas perilaku perubahan yang diharapkan terjadi.

b) Struktur Manajemen Program yang Tercermin dalam Berbagai Macam Peraturan yang Mengoperasikan Kebijakan

Sejauh mana kebijakan mampu mengatur proses jalannya pelaksanaan implementasi, diantaranya seberapa tepat dan jelas urutan tujuan resmi yang diharapkan, seberapa kuat dan terpercayanya teori sebab-akibat yang dibutuhkan, kepastian pembagian sumber dana, kesesuaian jenjang kewenangan internal dan eksternal instansi yang menjalankan tugas, ketentuan yang mengatur proses pembuat Keputusan di instansi yang menjalankan tugas, keputusan para pejabat terhadap maksud dan tujuan yang tertulis dalam undang-undang, dan akses resmi pihak eksternal untuk terlibat.

c) Faktor-Faktor di Luar Peraturan

Faktor eksternal yang mempengaruhi diluar undang-undang, meliputi kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi, respon positif masyarakat, kepercayaan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat, dan kemampuan pelaksana dalam menyatukan visi dan memimpin pelaksanaan.

3) Model George C. Edward III

Dengan pendekatan *top-down*, model implementasi Edward III menekankan 4 variabel penting yang menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan, diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Komunikasi

Efektivitas implementasi kebijakan sangat bergantung pada komunikasi yang baik dan memungkinkan pemahaman yang tepat dalam implementasi kebijakan tersebut.

b) Sumber daya

Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan akan gagal diimplementasikan. Sumber daya tidak hanya anggaran atau dana, melainkan mencakup jangkauan yang lebih luas, seperti sumber daya manusia, infrastruktur, teknologi dan waktu.

c) Disposisi

Para pelaksana kebijakan harus memiliki disposisi positif, yaitu sikap yang mendukung dan menerima kebijakan publik. Disposisi tidak hanya berarti tahu apa yang perlu dikerjakan, tetapi juga mampu mewujudkannya.

d) Struktur birokrasi

Kebijakan publik yang bersifat kompleks membutuhkan kerja sama yang baik dari banyak pihak. Jika struktur birokrasi tidak

mendukung kebijakan yang ada, maka sumber daya tidak akan efektif. Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus mampu mendukung kebijakan yang diputuskan dengan melakukan koordinasi yang baik.

3. Strategi

Menurut Munarika (2018) Strategi merupakan suatu proses perencanaan yang dilakukan oleh para pimpinan para petinggi organisasi, yang berorientasi pada pencapaian tujuan jangka panjang, serta mencakup penetapan langkah-langkah atau upaya yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Sedangkan menurut Diotin (2014) strategi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan perspektif mengenai harapan pelanggan di masa depan. Oleh karena itu, strategi dapat diartikan sebagai suatu rencana yang dirancang melalui langkah-langkah tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Dermawan, Lahming, dan S. Manddra 2018)

Dalam menghadapi permasalahan pengelolaan sampah, pemerintah perlu menerapkan berbagai strategi untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang baik. Dengan strategi tersebut diharapkan masalah dalam pengelolaan sampah dapat diatasi dengan mudah. Peran aktif masyarakat juga dapat menjadi faktor pendorong untuk keberhasilan berjalannya strategi pemerintah.

4. Pengelolaan Sampah

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018, pengelolaan sampah merupakan upaya yang dilakukan untuk menjaga kelestarian dan kualitas lingkungan, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan memanfaatkan sampah sebagai sumber daya yang dapat digunakan untuk memperoleh manfaat ekonomi.

Dalam pengelolaan sampah diperlukan kerja sama antar berbagai pihak agar pengelolaannya dapat berjalan dengan baik.

Proses pengelolaan sampah melalui beberapa tahap dimulai dari hulu ke hilir. Pengelolaan sampah tersebut direncanakan, dijalankan, dikelola, dan dievaluasi. Sistem yang tepat dalam pengelolaan sampah dapat dilakukan secara optimal (Amalia Sholihah 2020).

5. Kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Jeneponto

Kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Jeneponto telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019. Maksud dibuatnya kebijakan tersebut adalah agar pengelolaan sampah di Kabupaten Jeneponto dapat berjalan dengan baik dan dapat menciptakan lingkungan yang bersih. Dalam pelaksanaannya diperlukan partisipasi dari berbagai pihak untuk mencapai keberhasilan kebijakan tersebut.

Pasal 9 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah berbunyi:

1.) Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:
   a. Pengurangan sampah; dan
   b. Penanganan sampah.

Pasal 10 tentang Pengurangan Sampah berbunyi:

1.) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. pembatasan timbulan sampah;
   b. pendauran ulang sampah; dan/atau
   c. pemanfaatan Kembali sampah.
2.) Kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan Pemerintah Daerah meliputi:
   a. Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
   b. Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
   c. Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
   d. Memfasilitasi pelaksanaan 3R melalui Bank Sampah; dan
   e. Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Pasal 12 tentang Penanganan Sampah berbunyi:

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

   a. pemilahan sampah;
   b. pengumpulan sampah;
   c. pengolahan sampah;
   d. pengangkutan sampah; dan
   e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 25 tentang Tugas, berbunyi:

1.) Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan sampah hulur ke hilir secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
2.) Tugas pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
   b. Melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
   c. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan Upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
   d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah
   e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
   f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
   g. Melakukan koordinasi dengan Lembaga pemerintah, pemerintah daerah lainnya, masyarakat, kelompok masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; dan
   h. Menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat.

6. Penelitian Terdahulu

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

Judul (Penulis dan Tahun)	Nama Jurnal	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
Solving the Integrated Bin Allocation and Collection Routing Problem for Municipal Solid Waste: a Banders Decomposition Approach (Mahéo, Rossit, dan Kilby 2022)	Annals of Operations Research	Mixed Integer Programming + Benders Decomposition	Penelitian ini menggunakan metode khusus yaitu membagi masalah besar menjadi dua bagian yang lebih mudah diselesaikan: satu bagian fokus pada penempatan sampah dan satu bagian fokus pada rute kendaraan. Hasilya, metode ini terbukti lebih	Fokus pada efisiensi pengelolaan sampah	Pendekatan matematis dan GAP, bukan partisipasi masyarakat

			cepat dan efisien.		
ConvoWaste: An Automatic Waste Segregation Machine Using Deep Learning (Shahariar Nafiz dkk. 2023)	International Conference on Robotics, Electrical and Signal Processing Tecniques	Deep Learning (DCNN), IoT, GSM-based Monitoring	Penelitian ini menghasilkan mesin pintar yang bisa memilah sampah secara otomatis menggunakan kecerdasan buatan. Mesin ini mengenali jenis sampah seperti plastik, organik, dan logam dengan akurasi tinggi, kemudian mengarahkan ke tempat yang sesuai. Mesin ini juga dapat memberi tahu jika tempat sudah penuh dan dapat dikontrol melalui aplikasi android.	Tujuan mengurangi beban pengelolaan dan meningkatkan efisiensi	Berbasis AI dan hardware, bukan komunitas
Sosialisasi Pengelolaan Sampah sebagai Upaya Peningkatan Peran Masyarakat dalam Mengelola Sampah di Kota Serang (Mulyati, Ilmi, dan Basri 2023)	Jurnal Pengabdian Masyarakat	Edukasi dan Sosialisasi Masyarakat	Peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah	Tujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah	Fokus pada aspek sosial dan edukatif

Sampah dan Penyakit: Systematic Literature Review (Ritonga dan Usiono 2023)	Jurnal Kesehatan Tambusai	Penelitian ini menemukan bahwa masalah sampah di Kota Serang tidak bisa ditangani oleh pemerintah saja, tetapi perlu peran aktif masyarakat memahami cara mengelola sampah dengan benar. Hasilnya, masyarakat jadi lebih peduli dan ikut berperan aktif.	Sampah mempengaruhi kesehatan, Pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga	Pentingnya pemilahan dan pengelolaan dari rumah	Fokus pada dampak kesehatan dan pencemaran
Kajian Strategi Pengelolaan Sampah (Dwi Atmanti 2023)	Book Chapter: Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia dalam Mewujudkan Tujuan Ekonomi Inklusif	Studi Kepustakaan dan Data Nasional	Mayoritas RT tidak memilah sampah, dominasi paradigma lama	Semua membahas kelemahan sistem pengelolaan sampah	Penekanan pada kebijakan dan paradigma lama

B. Tinjauan Pustaka Terkait Karya

1. Definisi *Policy Brief*

Berdasarkan peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Bagi Analis Kebijakan, Risalah kebijakan (*policy brief)* merupakan sebuah tulisan ilmiah yang ditulis dengan ringkas, yang secara khusus membahas suatu masalah kebijakan dan memberikan berbagai solusi yang dapat dipertimbangkan oleh para pembuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Tujuan utama dari penyusunan *policy brief* yaitu yang pertama sebagai sarana eksplorasi dalam memberikan rekomendasi terpilih kebijakan. Selain itu, *policy brief* dapat menjadi sarana advokasi yang berfungsi menjadi wadah dengan menawarkan berbagai alternatif Solusi untuk suatu isu.

Berdasarkan peraturan LAN Nomor 28 Tahun 2017, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat sebuah *policy brief,* diantaranya:

a. Fokus pada suatu masalah kebijakan
b. Jelaskan tujuan
c. Identifikasi fakta formal yang mendukung tujuan
d. Argumentasikan dalam narasi yang mudah dipahami
e. Menyusun rekomendasi yang dapat digunakan oleh target pembaca atau audiens
f. Batasi tulisan kurang lebih 1500 kata, dengan jumlah 2 halaman sampai dengan 4 halaman (maksimal 8 halaman)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *policy brief* merupakan sebuah dokumen yang isinya menjelaskan mengapa suatu pilihan kebijakan dianggap paling tepat untuk mengatasi suatu permasalahan yang terjadi pada kebijakan tertentu. *Policy brief* bisa berfokus hanya pada satu pilihan dengan tujuan meyakinkan pembuat kebijakan bahwa masalah ini penting dan harus segera ditangani.

2. Tujuan dan Fungsi *Policy Brief*

Policy brief adalah menyediakan rekomendasi kebijakan yang ringkas namun informatif untuk mendukung para pembuat kebijakan dalam mengambil sebuah keputusan. Di dalam *policy brief* juga berfungsi memberikan kontribusi yang baik dengan menyajikan bukti-bukti nyata yang terjadi di lapangan sehingga kegagalan dalam implementasi kebijakan dapat diminimalisir. Dengan *policy brief* para pembuat kebijakan dapat meningkatkan kualitas kebijakan yang mereka buat.

3. Sistematika Penulisan *Policy Brief*

Berikut adalah komponen-komponen dalam sistematika penulisan *policy brief* berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 28 Tahun 2017:

a. Judul
   1.) Menarik sehingga pembaca menjadi ingin mengetahui lebih lanjut.
   2.) Memunculkan minat pembaca.
   3.) Singkat dan jelas mewakili substansi isi tulisan.

b. Ringkasan eksekutif (*executive summary*)
   1) Terdapat faktor-faktor yang menjadi akar masalahnya
   2) Mengapa masalah tersebut perlu/strategis.
   3) Bagaimana Solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut,
   4) Siapa yang menjadi subjek dalam menyelesaikan masalah tersebut.

c. Pendahuluan
   1.) Terdiri dari beberapa kalimat ringkas akan tetapi menarik minat untuk membaca keseluruhan.
   2.) Mengungkapkan urgensi dari topik yang diangkat

d. Deskripsi Masalah
   1.) Spesifik langsung ke inti permasalahan
   2.) Terukur disertai bukti-bukti yang memadai (*evidence-based)*
   3.) Analisis (apa, di mana, siapa, mengapa, dampak/efek)

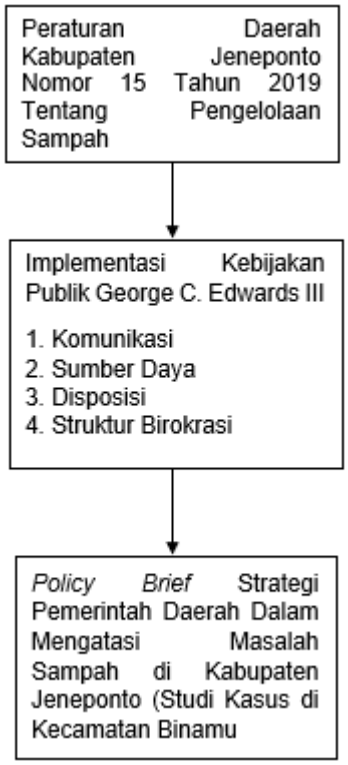
e. Rekomendasi
   1.) Spesifik memberikan Solusi terhadap permasalahan yang diangkat.
   2.) Terukur, dalam arti Solusi yang ditawarkan sesuai dengan kemampuan pemangku kepentingan (*stakeholder*) serta didukung oleh faktor-faktor yang ada.

3.) Alternatif (disertai analisis singkat, metode penentuan/pemilihan dan Gambaran singkat alternatif yang dipilih)

f. Apendiks (jika diperlukan)
g. Referensi utama

C. Kerangka Pikir

Gambar 2
Kerangka Pikir Menurut George C. Edward III



Sumber : Data Sekunder, 2025

Model implementasi tersebut dapat memberikan cara yang jelas dan terstruktur untuk menilai bagaimana strategi pemerintah dalam mengatasi masalah pengelolaan sampah yang dijalankan di lapangan. Dengan memperhatikan 4 aspek utama dalam model ini, peneliti bisa mengetahui apa saja kendala yang dihadapi serta langkah-langkah apa yang harus dilakukan agar kebijakan dapat berjalan dengan baik.